

Analisa Disparitas Pendapatan Antar Kabupaten Di Provinsi Banten

Petrus T. Resi¹⁾

Sabam Simbolon²⁾

Universitas Buddhi Dharma, Indonesia, Banten

ABSTRAK

Penelitian ini diberi judul Analisa Disparitas Pendapatan pada Kabupaten di Provinsi Banten. Penelitian ini merupakan untuk mendapatkan gambaran terkait dengan pendapatan di kabupaten yang ada dalam provinsi Banten dalam kurun waktu 2012-2016. Masalah penelitian ini adalah bagaimana kesenjangan pendapatan dari lihat dari analisis Indeks William dan Indeks Entropy Theil di kabupaten dalam provinsi Banten. Data penelitian adalah data sekunder yaitu data statistic dari BPS provinsi Banten dan Kabupaten dalam provinsi Banten, dan diolah dengan cara tabulasi.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk kabupaten Pandeglang dari 0,476 % tahun 2012 turun menjadi 0,47 % tahun 2016, kabupaten Serang tahun 1,01 % tahun 2012 menjadi 0,69 % tahun 2016, kabupaten Lebak dari 0,85 % tahun 2012 menjadi 0,76 % tahun 2016, dan kabupaten Tangerang dari 3,03 % tahun 2012 menjadi 3,17 % tahun 2016. Sedangkan tingkat pertumbuhan penduduk provinsi Banten adalah 2,17 % tahun 2012 menjadi 2,07 % tahun 2016.

Tingkat pertumbuhan PDRB masing-masing kabupaten dan provinsi mengalami penurunan dari tahun 2012 ke tahun 2016. Kabupaten Pandeglang dari 7,86 % tahun 2012 menjadi 8,49 % tahun 2016. Kabupaten Serang dari 8,36 % tahun 2012 menjadi 7,34 % tahun 2016, dan kabupaten Tangerang dari 7,49 % tahun 2012 menjadi 4,19 % tahun 2016. Tingkat provinsi juga menunjukkan penurunan dari 9,23 % tahun 2012 menjadi 4,19 % tahun 2016.

Analisis Indeks William menunjukkan bahwa indeks dibawah 50 % yaitu kisaran 290 % dan 30 %, yang artinya adanya pemerataan pendapatan diantara kabupaten dalam provinsi Banten. Sedang menurut Indeks Entropy Theil menunjukkan angka 1 lebih yang berate bahwa disparitas pendapatan dalam kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang dan Tangerang sangatlah tinggi. Hal ini bisa diakibatkan konsisi geografis, pertumbuhan penduduk, dan investasi modal, serta kebijakan pembangunan yang berbeda diantara daerah tersebut.

Simpulannya adalah bahwa tingkat pendapatan pada kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang dan Tangerang memnurut Indeks William tidak masih sangat besar namun menuju pemerataan, sedangkan menurut analisis indeks Entopy Theil bahwa disparitas pendapatan diantara kabupaten dalam provinsi Banten masih tinggi.

Kata Kunci : PDRB, dan Disparitas

ABSTRACT

This reaserch was entitled the Analysis of Income Disparity in Districts in Banten Province. This research is a descriptive research that is to get an overview related to income in the regencies in Banten province in the period 2012-2016. The problem of this research is how the income gap is from the analysis of William Index and Theil Entropy Index in the district in Banten province. The data used are statistical data from Banten province BPS and regencies in Banten province, and processed by tabulation.

The results of the reaserch that Pandeglang Regency has a variation in height between 0 - 1,778 m above sea level (asl). Most of the topography of the area of Pandeglang Regency is lowland in the Central and South regions which have an area of 85.07% of the total area of Pandeglang Regency. Geographically, the area of Lebak Regency is at 105 25 ' - 106 30 BT and 6 18 ' - 7 00 ' LS. The northern part of the regency is in the form of lowlands, while in the south is the mountains, with the peak of Mount Halimun at the southeastern end, which is on the border with Bogor Regency and Sukabumi Regency. Ciujung River flows to the north, is the longest river in Banten. Topographically, Serang Regency is a lowland and mountainous region with a height between 0 and 1,778 m above sea level. Most of the lowlands have a height of less than 500 meters, while the highlands are mountain ranges found on the border with Pandeglang Regency. Tangerang Regency is a lowland with an altitude of 0-85 meters above sea level, located at 6 ° 00' -6 ° 20 ' South Latitude and between 106 ° 20' -106 ° 43' East Longitude. The area of Tangerang Regency, is in the form of land covering an area of 959.60 sq. km.

Keywords: GRDP, and Disparity

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi merupakan dua tujuan pembangunan yang seharusnya dapat dicapai secara bersamaan dalam proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan agar jurang pemisah pendapatan antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat lainnya tidak semakin besar, atau tidak terjadi peningkatan kemiskinan suatu daerah tertentu. Pertumbuhan dengan pemerataan mengenai distribusi pendapatan nasional atau regional merupakan suatu hal penting diperhatikan setiap negara atau daerah terutama pada negara-negara berkembang (Indonesia). Kemudian bahwa pertumbuhan dan pemerataan tersebut sangat sulit diwujudkan dalam waktu yang bersamaan. Pencapaian antara pemerataan dan pertumbuhan menuntut adanya pengorbanan antara yang pertumbuhan dengan pemerataan.

Tolok ukur keberhasilan pembangunan satu sisi adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi dan pada sisi lain terciptanya jurang perbedaan atas pendapatan antar

masyarakat akan semakin kecil antar baik antar daerah maupun antar sektor. Namun, secara umum pertumbuhan ekonomi tidak selalu terdapat pemerataan pendapatan yang memadai. Ketimpangan antar daerah sering menjadi masalah serius dalam pembuatan kebijakan pembangunan. Sebab, ada kalanya daerah tertentu memiliki pertumbuhan cepat, sementara daerah lain mengalami pertumbuhan yang melambat. Daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan beberapa hal misalnya karena rendahnya sumber-sumber yang tersedia, rendahnya investasi, rendahnya fasilitas transportasi, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi yang kurang memadai, serta sumber daya manusia yang kurang terampil. Selain itu pertumbuhan ekonomi tidak merata sebagai akibat adanya ketidakmerataan redistribusi pendapatan antara pemerintah pusat ke daerah. (Kuncoro, 2004).

Pembangunan merupakan suatu proses yang mengakibatkan berbagai dampak perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula akselerasi pertumbuhan

ekonomi. Selain itu terciptanya penurunan ketimpangan yang mengurangi kemiskinan secara absolut (Todaro, 2000). Menurut (Sukirno,1985), pembangunan ekonomi merupakan suatu proses untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses untuk meningkatkan pendapatan riil perkapita penduduk di suatu negara atau satu daerah dalam jangka panjang.

Disparitas regional di Indonesia disebabkan antara lain oleh kebijakan yang diterapkan pada Undang-Undang (UU) no. 5 tahun 1974 yang menyatakan bahwa pemerintah pusat menguasai dan mengendalikan sebagian besar pendapatan daerah seperti pendapatan dari hasil kekayaan alam dari sektor pertambangan, minyak bumi, gas, hutan dan perkebunan, dan ditetapkan sebagai penerimaan Negara.

Provinsi Banten merupakan satu provinsi pemekaran dari provinsi Jawa Barat. Provinsi ini terdapat 8 (delapan) daerah tingkat dua kabupaten dan kota, yaitu 4 (empat) daerah kabupaten dan 4 (empat) daerah kota. Pembangunan di provinsi Banten terus berproses dan semakin berkembang seiring dengan

diberlakukannya Undang-undang Otonomi daerah no.32 tahun 2004. Sehingga pemerintah daerah provinsi Banten dan pemerintah daerah tingkat dua akan semakin lebih kreatif untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat di daerah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi daerah penelitian

Provinsi Banten. adalah merupakan pemekaran dari provinsi Jawa Barat pada tahun 2000 dengan wilayah meliputi : Cilegon, Tangerang, Serang, Pandeglang dan Lebak dengan Ibukota provinsi kota Serang. Kemudian sekitar tahun 1993 nama Tangerang dari kota administrative berubah menjadi kota Tangerang dan Tangerang selatan merupakan pemekaran dari kota Tangerang tahun 2008, sehingga jumlah wilayah tingkat II (dua) dalam provinsi Banten menjadi 8 (delapan) daerah tingkat II (dua) yang terdiri atas: Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang, kota Serang, Cilegon, Tangerang dan kota Tangerang Selatan. . Meskipun usianya masih muda Provinsi Banten merupakan salah daerah yang cukup besar sumbangannya dalam

memperjuangkan kemerdekaan negeri ini bersama-sama dengan daerah-daerah yang lainnya, termasuk dalam memperjuangkan nama resmi Provinsi Banten, dengan Ibukotanya Serang

2. Geografis dan Topografi.

Secara Administratif, Provinsi Banten terdiri dari 4 (empat) Kabupaten dan 4 (empat) Kota. Daftar Kabupaten dan

Kota di Provinsi Banten dan Ibukota serta luas wilayahnya ditunjukkan seperti pada table 4.1. Dari table 4.1 dapat diketahui kabupaten yang paling luas adalah kabupaten Lebak dengan luas 3.426,56 km per segi, sedangkan kabupaten yang luasnya paling kecil adalah kabupaten Tangerang dengan luas 1.011,86 km persegi.

Tabel 4.1 : Luas wilayah tingkat dua menurut Kabupaten dan Kota Prov Banten

No.	Kabupaten/ Kota	Ibu kota	Luas Wilayah
1	Kabupaten Lebak	Rangkasbitung	3.426,56 km ²
2	Kabupaten Pandeglang	Pandeglang	2.746,89 km ²
3	Kabupaten Serang	Ciruas	1.734,28 km ²
4	Kabupaten Tangerang	Tigaraksa	1.011,86 km ²

Sumber : BPS Provinsi Banten

Wilayah Banten berada pada batas astronomi 5° 7' 50" - 7° 1' 11" L.S dan 105° 1' 11" - 106° 7' 12" B.T, dengan luas 8.651,20 Km². Pada awalnya Provinsi Banten terdiri dari 2 (dua) Kota, 4 (empat) Kabupaten, dengan 140 Kecamatan, dan 262 Kelurahan, serta 1.242 Desa. Dan dalam beberapa tahun kemudian terjadi pemekaran sehingga provinsi Banten terdiri atas 4 (empat) kabupaten dan 4 (empat) kota, atau 8 (delapan) daerah tingkat dua.

Kabupaten Pandeglang

Kabupaten Pandeglang, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Banten, Indonesia. Ibukotanya

adalah Pandeglang. Kabupaten ini berbatasan di sebelah utara dengan kabupaten Serang, di sebelah Timur dengan Kabupaten Lebak, dan sebelah barat dan selatan dengan Samudra Indonesia. Secara geografis, wilayah Kabupaten Pandeglang merupakan daerah perbukitan ke arah zona Bogor. Kabupaten Pandeglang berada pada ketinggian antara 0 - 1.778 m dpl. Sebagian besar topografinya adalah daerah dataran rendah yang dapat dijumpai di daerah Tengah dan Selatan kabupaten tersebut yang memiliki luas 85,07% dari luas kabupaten Pandeglang. Daerah ini

memiliki daerah pegunungan dengan ketinggian yang relatif rendah, diantaranya adalah Gunung Payung (480 m), Gunung Honje (620 m), Gunung Tilu (562 m) dan Gunung Raksa (320 m). Kabupaten Pandeglang bagian Utara memiliki luas 14,93 % adalah merupakan dataran tinggi, hal ini dapat dilihat dengan adanya Gunung Karang (1.778 m), Gunung Pulosari (1.346 m) dan Gunung Asepun (1.174 m).

Kabupaten Lebak

Kabupaten Lebak (Latin: Kab. Lebak) adalah sebuah kabupaten di Provinsi Banten, dengan Ibukotanya Rangkasbitung. Kabupaten ini sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Serang sebelah selatan dengan Samudera Indonesia, sebelah barat dengan dengan kabupaten Pandeglang, dan sebelah Timur dengan Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor serta Kabupaten Sukabumi.

Secara geografis wilayah Kabupaten Lebak berada pada 105 25' - 106 30 BT dan 6 18' - 7 00' LS. Bagian utara kabupaten terdiri atas dataran rendah, dan sebelah selatan merupakan daerah pegunungan, dengan puncaknya

Gunung Halimun. Kabupaten Lebak memiliki luas sebesar 304.472 Ha.

Kabupaten Serang

Kabupaten Serang berkaitan dengan sejarah Banten pada umumnya, sebab Serang pada awalnya adalah merupakan bagian dari wilayah Kerajaan / Kesultanan Banten pada Abad ke XVI yang pusat Pemerintahannya berada di daerah Serang. Secara geografis wilayah Kabupaten Serang berbatasan dengan Laut Jawa, kota Cilegon dan kota Serang di sebelah utara, kabupaten Tangerang di sebelah Timur, dengan kabupaten pandeglang di sebelah selatan dan Selat sunda sebelah Barat.

Kabupaten Tangerang

Tangerang merupakan pemindahan Jakarta Ken Yaskusyo sesuai dengan Po No. 34/2604, dan kemudian terbentuknya pemerintahan di Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang merupakan dataran rendah yang berada pada ketinggian 0-85 meter dari atas permukaan laut, yang terletak pada 6°00'-6°20' L.S. dan antara 106°20'-106°43' B.T, dengan luas wilayah seluas 959,60 km persegi.

Pertumbuhan perekonomian kabupaten Tangerang sebagai daerah

lintasan dan berdekatan dengan Ibukota Negara Jakarta cukup pesat. Hal ini terlihat setelah dikeluarkannya Inpres No.13 Tahun 1976 tentang pengembangan wilayah Jabotabek, dimana kabupaten Tangerang salah satu daerah di dalamnya sebagai daerah penyangga untuk provinsi DKI Jakarta. Perekonomian kabupaten Tangerang didominasi oleh industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran. Selain itu kabupaten Tangerang merupakan salah satu pusat industri di provinsi Banten.

3. Penduduk Kabupaten dan Provinsi Banten

Provinsi Banten terdiri atas 8 (delapan) daerah tingkat dua yang terbagi atas 4 (empat) Kabupaten dan 4(empat) daerah kota. Untuk penelitian ini akan dibahas daerah tingkat kabupaten.

Pada table 4.2 menunjukkan bahwa penduduk kabupaten kuranga lebih 61 % dari penduduk tingkat provinsi Banten,atau penduduk terdistribusi di daerah KAbupaten 61 % dan daerah perkotaan 39 %.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk menurut Kapupaten dan Provinsi Banten 2012-2017 (%)

Kabupaten	2012	2013	2014	2015	2016
Tangerang	27,12	27,57	27,89	28,19	28,50
Serang	12,88	12,76	12,50	12,33	12,16
Pandegelang	10,50	10,33	10,15	9,99	9,84
Lebak	11,02	10,90	10,76	10,62	10,48
Sub total	61,53	61,47	61,34	61,14	60,74
Provinsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sumber : BPS Prov.Banten dalam angka 2012-2017,diolah

Penduduk paling tinggi adalah Kabupaten Tangerang sekitar 28 % dan paling rendah adalah kabupaten

Pandeglang rata-rata sekitar 9 % dalam kurun waktu tahun 2012-2016 (Tabel 4.3).

Tabel 4.3 Laju Petumbuhan Penduduk menurut Kabupaten pada Prov.Banten

Kabupaten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pandeglang	0,76	0,74	0,86	0,46	0,55	0,47
Serang	1,01	0,99	0,92	0,84	0,77	0,69
Tangerang	3,03	3,01	3,34	3,39	3,24	3,17
Lebak	0,85	0,83	0,98	0,91	0,83	0,76
Provinsi Banten	2,17	2,16	2,27	2,20	2,14	2,07

Sumber : Sumber : BPS Prov.Banten dalam angka 2012-2017,diolah

4. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi salah satu indikator yang dipakai dalam analisis pembangunan ekonomi di suatu daerah ataupun negara. Pertumbuhan ekonomi memberikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan distribusi pendapatan yang merata diantara masyarakat antar daerah atau negara. Dalam analisis pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilakukan dengan menganalisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) beserta laju pertumbuhannya. Namun, perlu diingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat juga menimbulkan penyimpangan/disparitas distribusi pendapatan baik antar daerah maupun antar negara. Hal ini dapat diakibatkan oleh berbagai kebijakan pemerintah terutama sifatnya sentralistik..

Pada table 4.4 ditunjukkan PDRB atas dasar harga berlaku menurut kabupaten dan Provinsi Banten selama

kurun waktu 2012-2016. Kabupaten Tangerang adalah kabupaten yang paling tinggi PDRBnya rata-rata sebesar Rp 90.737,91 miliar dan Kabupaten yang paling rendah PDRBnya diantara 4 (empat kabupaten) di provinsi Banten adalah Kabupaten Lebak rata-rata dalam kurun waktu pengamatan sebesar Rp 18,733 miliar. Kabupaten dengan tingkat pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku pada setiap kabupaten di provinsi Banten menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat pada kurun waktu 2014-2016, dan mengalami penurunan pada tahun 2016. Demikian juga pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten mengalami hal yang sama dengan kabupaten untuk kurun waktu yang sama (table 4.5).

Tingkat pertumbuhan menurut harga berlaku menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan kabupaten lebih tinggi dibanding dengan tingkat

pertumbuhan provinsi dalam kurun waktu pengamatan (table 4.6).

Tabel 4.4 PDRB atas dasar harga berlaku menurut kabupaten tahun 2012-2016 (juta)

Kabupaten	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pandeglang	15115436.76	16443905.89	18203769.04	20339261.34	22168666.57
Lebak	15125899.36	16742046.8	18594546	20675248.22	22527849.15
Tangerang	72303651.4	80570551.87	91410471.61	101564681.2	109172163.5
Serang	42039509.83	45972293.42	51320986.07	56684286.82	61266306.78
Provinsi Banten	338224929.3	377836082.2	428740068.9	478543971.7	516326900.5

Sumber : Sumber : BPS Prov.Banten dalam angka 2012-2017,diolah

Tabel 4.5 Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku menurut Kabupaten tahun 2012-2016 (%)

No	Kabupaten	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pandeglang	5,81	4,72	4,93	5,96	5,49
2	Lebak	5,11	6,30	5,83	5,80	5,70
3	Serang	5,42	6,04	5,39	5,02	5,00
4	Tangerang	6,17	6,41	5,37	5,36	5,32
	Prov Banten	6,83	6,67	5,58	5,54	5,51
	Rata-rata	5,62	5,87	5,38	5,34	5,38

Sumber : BPS Prov.Banten dalam angka 2012-2017,diolah

Tabel 4.6 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten di Provinsi Banten (persen), 2012–2016

No	2012	2013	2014	2015	2016
Pandeglang	5.81	4.72	4.93	5.96	5.49
Lebak	5.11	6.30	5.83	5.80	5.70
Tangerang	6.17	6.41	5.37	5.36	5.32
Serang	5.42	6.04	5.39	5.02	5.00
Provinsi Banten	6.83	6.67	5.58	5.54	5.51

Sumber : BPS Prov.Banten dalam angka 2012-2017,diolah

Selanjutnya, ditunjukkan pada table 4.7 distribusi PDRB untuk kabupaten pada tahun 2016 adalah untuk daerah Kabupaten Pandeglang dan kabupaten Lebak menunjukkan bahwa kontribusi PDRB masih paling tinggi dari sektor

pertanian yang kemudian diikuti dari sektor perdagangan, pertambangan dan industry pengolahan. Sedangkan kabupaten Serang dan Tangerang distribusi PDRBnya didorong oleh sektor industri pengolahan dan

konstruksi. Sedangkan untuk tingkat provinsi distribusi PDRB paling dominan adalah industri pengolahan sebesar 32,6 % dan paling rendah adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,79 %.

Tabel 4.7 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Menurut Kabupaten 2016 (%)

Kategori	Pandeglang	Lebak	Serang	Tangerang	Prov. Banten
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33.94	28.56	10,18	6.88	6
Pertambangan dan Penggalian	10.44	7.13	0.11	0.05	0.79
Industri Pengolahan	5.76	9.06	48.99	37.25	32.6
Pengadaan Listrik dan Gas	0.55	0.1	0.31	5.11	2.32
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.06	0.05	0.03	0.06	0.08
Konstruksi	4.97	7.09	10.4	13.12	10.2
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.25	12.16	8.58	10.76	12.2
Transportasi dan Pergudangan	5.72	6.14	3.6	2.79	10.7
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.38	4.97	2.33	1.49	2.38
Informasi dan Komunikasi	0.3	0.54	0.79	3.25	3.53
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.56	1.75	2.86	5.31	3.04
Real Estate	7.04	6.21	4.34	6.9	7.17
Jasa Perusahaan	0.23	0.32	0.23	1.02	1.05
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.36	5.85	2.21	1.69	2.04
Jasa Pendidikan	3.41	6.3	3.81	2.46	3.24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.95	1.1	0.51	0.4	1.16
Jasa lainnya	1.07	2.66	1.04	1.45	1.56
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten dan Provisni ,2016 diolah

5. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita menurut kabupaten dan Provinsi Banten dapat dilihat seperti pada table 4.8 dan 4.9. Pada table 4.8 menunjukkan bahwa pendapatan perkapita tingkat kabupaten yang paling tinggi adalah Kabupaten Serang dan pendapatan perkapita paling rendah adalah di

kabupaten Lebak. Pada table 4.9 menunjukkan pertumbuhan pendapatan perkapita tingkat kabupaten di provinsi Banten dalam kurun waktu 2012-2016. Kabupaten yang menunjukkan tingkat pertumbuhan yang meningkat 2013-2014 dan kemudian mengalami penurunan dalam kurun waktu 2015-

2016. Kabupaten yang pertumbuhan pendapatan perkapitanya paling tinggi adalah kabupaten Pandeglang dan pertumbuhan paling rendah adalah Kabupaten.

Tabel 4. 8 Pendapatan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten di Provinsi Banten

No	Kabupaten	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pandeglang	12.887.170,84	13.900.107,02	15.317.816,74	17.021.568,97	18.466.012,84
2	Lebak	12.239.704,29	13.416.114,68	13.177.546,35	16.439.638,31	17.327.233,14
3	Serang	29.240.909,93	31.685.491,84	35.077.028,54	38.448.247,68	41.270.614,66
4	Tangerang	23.662.041,29	25.514.934,54	27.999.002,08	30.132.576,04	31.393.908,55
	Provinsi Banten	30.202.440,56	32.991.606,80	36.648.573,07	40.071.566,09	42.471.880,21

Sumber : BPS Provinsi banten 2012-2017,diolah

Kemudian PDRB per kapita untuk masing-masing kabupaten dan provinsi Banten ditunjukkan pada table 4.10. Pendapatan paling tinggi adalah Kabupaten Tangerang sedangkan pendapatan paling kecil adalah kabupaten Serang diantara empat kabupaten yang dia,mati. Pada table 4.11 dapat dilihat laju pertumbuhan PDRB menurut harga konstan (2010) menunjukkan tingkat pertumbuhan pada kisaran 5 % hingga 7 % selama kurun waktu pengamatan.

Tabel 4.9 Laju Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita atas dasar harga berlaku menurut Kabupaten di Provinsi Banten tahun 2012-2016 (%)

No	Kabupaten	2013	2014	2015	2016
1	Pandeglang	7,86	10,11	11,12	8,49
2	Lebak	9,61	-1,78	24,75	5,40
3	Serang	8,36	10,70	9,61	7,34
4	Tangerang	7,83	9,74	7,62	4,19
	Prov Banten	9,23	11,08	9,34	5,99

Sumber : BPS Provinsi banten 2012-2017,diolah

Tabel 4.10 Pendapatan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kota di Provinsi Banten, 2012 - 2016

No	Kota	2012	2013	2014	2015	2016
1	Cilegon	141.650.600,84	155.024.554,11	172.091.916,42	187.473.514,10	196.840.759,01
2	Serang	25.575.818,65	28.222.401,18	31.148.326,50	33.966.340,44	36.533.105,14
3	Tangerang	43.919.047,48	48.433.319,88	54.830.931,04	60.903.915,53	64.997.396,96
4	Tangsel	28.020.187,82	30.723.741,05	33.539.278,99	36.300.235,42	38.098.395,54

Sumber : BPS Provinsi banten 2012-2017,diolah

4.11 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten di Provinsi Banten, 2011-2016

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Kabupaten (%)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kab Pandeglang	5.74	5.81	4.72	4.93	5.96	5.49
Kab Lebak	5.99	5.11	6.3	5.83	5.8	5.7
Kab Tangerang	6.75	6.17	6.41	5.37	5.36	5.32
Kab Serang	6.1	5.42	6.04	5.39	5.02	5
Provinsi Banten	7.03	6.83	6.67	5.51	5.4	5.26
<i>"Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Kab/Kota", "Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Kab/Kota"</i>						

Sumber : BPS Provinsi banten 2012-2017,diolah

6. Disparitas Pendapatan Kabupaten di Provinsi Banten

Analisa Indeks William merupakan satu analisis yang menggambarkan bagaimana tingkat disparitas yang mungkin terjadi di antara daerah dalam satu wilayah tertentu. Demikian halnya dengan 4 (empat) yang diamati menunjukkan indek wiliam pada kisaran 0.3 pada tahun 2012-2014 dan menurun menjadi 0.29 pada tahun 2015 dan 2016. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejangan yang ada di

daerah kabupaten dalam provinsi banten masing cukup tinggi namun dapat diturunkan sedikit dikit. Kesenjangan ini bisa diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk,potensi daerah ,gegrafis daerah yang berbeda bahkan kebijakan pembangunan oleh pemerintah yang berbeda untuk masing-masing kabupaten (table 4.12).Dengan demikian tingkat pendapatan perkapita dalam 4 (empat) kabupaten tersebut semakin merata.

Tabel 4.12. Indeks Wiliam

Tahun	iw	Petumbuhan Ekonomi
2012	0.3	5,62
2013	0.3	5,87
2014	0.3	5,38
2015	0.29	5,34
2016	0.29	5,38

Sumber : BPS Provinsi banten 2012-2017,diolah

Kemudian dari sudut Indek theil untuk 4 (empat) kabupaten tersebut menunjukkan fluktuatif antara tahun

2012 - 2016 yaitu tahun 2012 sebesar 1,7108 dan turun menjadi kiran 1,68 tahun 2013 dan kembali naik menjadi

1,7 pada tahun 2016. Dengan demikian berdasarkan indeks Entropy Theil bahwa pendapatan di kabupaten dalam provinsi banten tergolong pada disparitas yang tinggi, kesenjangan pendapatan dianata daerah kabupaten

sangat tinggi. Hal ini bisa diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk, potensi daerah ,geografis daerah yang berbeda bahkan kebijakan pembangunan oleh pemerintah yang berbeda untuk masing-masing kabupaten.

Tabel 4.13 Indeks Theil

Tahun	IT	Pertumbuhan Ekonomi
2012	1,7108	5,62
2013	1,6810	5,87
2014	1,6505	5,38
2015	1,6781	5,34
2016	1,7044	5,38

Sumber : BPS Provinsi banten 2012-2017,diolah

Tabel 4.14 Tabel IW dan IT

Tahun	IW	IT
2012	0,30	1,7108
2013	0,29	1,6810
2014	0,30	1,6505
2015	0,29	1,6781
2016	0,29	1,7044
Rata-rata	0,29	1,6850

Sumber : BPS Provinsi banten 2012-2017,diolah

REFERENSI

- Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi daerah, Edisi I, BPFE, Yogyakarta
- BPS , Kabupaten Pandeglang dalam Angka, 2013-2017
- BPS , Kabupaten Lebak dalam Angka, 2013-2017
- BPS , Kabupaten Serang dalam Angka, 2013-2017
- BPS , Kabupaten Tangerang dalam Angka, 2013-2017
- BPS , Provinsi Banten Serang dalam Angka, 2013-2017
- Kuncoro, mudrajad. 2002. Analisis spasial dan regional: studi aglomerasi dank luster industry Indonesia. Yogyakarta. UPP AMP YKPN
- Machmud, , Analysis Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan. Kajian Ekonomi, Jakarta
- Mudrajad Kuncoro, 2001, Analisis Spasial dan Regional, AMP YKPN, Yogyakarta
- Myrdal, G. 1957. Economic Theory and Underdeveloped Region,
- Robinson T, 2004. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi Bumi Aksara, Jakarta
- Santoso Boediono, 1992, Pertumbuhan Ekonomi , Seri Sinopsis Pengantar

Ilmu Ekonomi No.4, Edisi 1, BPFE
Yogyakarta

Sukirno, Sadono. 1985 . Ekonomi
Pembangunan, Proses, Masalah dan
Dasar

Kebijakan, LPFE UI. Jakarta

Sjafrizal, 2008. Ekonomi Regional, Teori
dan Aplikasi. Baduose Media,
Cetakan Pertama. Padang

Tambunan, TH. 2001. Perekonomian
Indonesia, Teori dan Temuan
Empiris. Penerbit Ghalia Indonesia.
Jakarta

Todaro, Michael P. 2009. Pembangunan
Ekonomi Dunia Ketiga, Edisi
Kesembilan, Erlangga Jakarta.

Williamson, J. G. 1965. "Regional
Inequality and the Process of National
Development : a Description of Patterns".
"Economic Development and Cultural